



## PENCORETAN DATA KMS PERLU DIEVALUASI

# Fraksi PKS Desak Indikator Lebih Valid

**YOGYA (KR)** - Fraksi PKS DPRD Kota Yogya mendesak indikator verifikasi terhadap calon pemegang Kartu Menuju Sehat (KMS) yang lebih valid. Hal ini seiring munculnya aduan masyarakat yang tahun ini tercoret dari pemegang KMS.

Anggota Komisi D DPRD Kota Yogya dari Fraksi PKS, Bambang Anjar Jalumurti, mengungkapkan pihaknya sudah menggelar rapat kerja bersama tim eksekutif terkait persoalan KMS. "Ini harus menjadi evaluasi, dan ternyata kita temukan indikator yang perlu dipertegas kembali agar semakin valid," tandasnya, Jumat (3/2).

Rapat kerja melibatkan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) selaku instansi yang menerbitkan KMS. Selain itu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) terkait indikator, dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) kaitannya de-

ngan akses pendidikan pemegang KMS.

Bambang mengaku dalam rapat tersebut pihaknya meminta pembukaan data secara gamblang. Hal ini karena pemegang KMS tahun ini meningkat dibanding tahun lalu, namun jumlah warga yang tercoret juga cukup banyak. "Satu sisi jumlahnya bertambah. Dari tahun 2022 terdapat 15.810 KK atau 48.797 jiwa sedangkan tahun ini ada 17.451 KK atau 49.121 jiwa. Tetapi yang akhirnya tercoret ternyata juga cukup banyak," urainya.

Dari temuan tersebut pihaknya lantas melakukan sampling terhadap data warga yang tercoret dari pemegang KMS. Hasilnya, secara realita kehidupannya masih jauh dari mandiri namun hasil verifikasinya tergolong mandiri. Keluarga yang disampel tersebut memiliki penghasilan Rp 1,8 juta per bulan dan menanggung tiga orang anak yang masih sekolah.

Namun karena memiliki kulkas, smartphone serta daya listriknya 900, akhirnya hasil skoring masuk kategori mandiri. Padahal, imbuhan Bambang, kulkas yang dimiliki keluarga tersebut untuk kepentingan produksi usaha serta smartphone mendukung kegiatan pembelajaran.

"Kalau dikomparasikan UMK yang mencapai Rp 2 juta lebih kan tentu masih jauh dari kategori mandiri. Apalagi masih harus menanggung keperluan sekolah untuk anak-anaknya. Realitanya tentu belum mandiri," tandasnya.

Oleh karena itu Bambang mendesak agar data warga yang tercoret dari KMS perlu ditelusuri. Indikator yang digunakan pun harus dievaluasi serta diperbarui agar validitasnya terjaga. Kondisi tersebut harapannya menjadi titik awal dalam intervensi kebijakan afirmatif yang tepat sasaran. **(Dhi)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 04 Juli 2026

Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**

NIP. 19690723 199603 1 005